

BAB II

IMPLEMENTASI HYOGO FRAMEWORK FOR ACTION (HFA) DI INDONESIA

Bencana alam bukan merupakan permasalahan baru yang dihadapi dunia saat ini. Bencana alam merupakan kejadian yang bersumber dari faktor-faktor berantai dalam perubahan alam di bumi. Bencana alam disebabkan karena adanya perubahan secara geologi dan klimatologi sehingga ada perubahan yang berasal dari bumi seperti pergeseran lempeng dan kegiatan vulkanik serta perubahan yang disebabkan oleh cuaca. Pemanasan global juga mulai dianggap sebagai ancaman serius terutama dampaknya terhadap perubahan iklim bumi sehingga marak terjadi bencana di berbagai belahan dunia.

Seiring dengan semakin maraknya kejadian bencana alam di berbagai belahan dunia dan menimbulkan kerugian baik dari ekonomi, sosial dan pemerintahan. Bencana alam saat ini menjadi salah satu ancaman alam terhadap negara-negara di dunia karena mampu menimbulkan dampak dan kerugian serius. Sehingga bencana alam dan pengurangan risikonya menjadi isu yang sering diangkat dalam sidang umum Persyarikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk dapat diresolusi dalam skala global.

A. Hyogo Framework for Action (HFA)

Negara-negara saat ini mendapat satu lagi masalah global yang tidak bisa diabaikan, setelah perubahan iklim, dunia harus menghadapi permasalahan yang muncul akibat dari hal tersebut. Bencana alam kemudian menjadi topik yang dibahas dalam majelis dan rapat PBB.

Ide untuk melakukan tinjauan global dalam kebencanaan dimulai dari inisiatif pengurangan bencana dan dilahirkan di awal milenium baru, mengacu kepada *United Nations International Decade for Natural Disaster Reduction* (1990-1999). Dekade menunjukkan bahwa meskipun penurunan kehilangan nyawa, jumlah bencana dan

kerugian ekonomi yang terkait bahkan meningkat. Dalam banyak kasus kerugian yang disebabkan oleh kurangnya strategi pengurangan bencana koheren oleh organisasi internasional dan regional, pemerintah dan para pengambil keputusan dan perkembangan budaya pencegahan antara masyarakat luas.¹

Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana kedua (*World Conference on Disaster Reduction - WCDR II*) diselenggarakan di kota Kobe, prefektur Hyogo, Jepang, dari tanggal 18 sampai 22 Januari 2005. Melalui resolusi Majelis Umum PBB A/RES/58/214, konferensi tersebut terlaksana dan berhasil membuat rencana-rencana untuk 10 tahun mendatang, setelah terhenti beberapa lama tanpa membuat kemajuan yang berarti di bidang pengurangan resiko bencana alam sejak konferensi dunia pertama yang diselenggarakan di Yokohama, Jepang, tahun 1994.²

Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana telah melahirkan *Hyogo Framework for Action (HFA)* atau kerangka kerja aksi Hyogo untuk tahun 2005 hingga 2015. Sasaran utama dari tindakan dan deklarasi tersebut adalah ketahanan masyarakat dan bangsa-bangsa terhadap bencana. Pendekatan komprehensif untuk mengurangi risiko bencana dicanangkan dalam kerangka aksi Hyogo yang didukung oleh 162 negara dan diadopsi pada tahun 2005. HFA dikembangkan untuk memastikan pengurangan kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat serta negara-negara akibat bencana.³

Konsep pengurangan risiko bencana yang terdapat dalam kerangka kerja aksi Hyogo tidak terlepas dari sasaran-sasaran strategis yang diadopsi dan ditinjau dari *Yokohama Strategy*. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Konferensi Dunia tentang

¹ UNISDR, "*Living With Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives*", Edisi Kedua, Geneva, 2004, hlm. 1.

² UNISDR, "*Pengurangan Bencana di Asia & Pasifik*", Edisi Kedua, Bangkok, 2006, hlm. 4.

³ Lei Zhou, Srinath Perera, Janaka Jayawickrama, Onaopepo Adeniyi, "*The Implication of Hyogo Framework for Action for Disaster Resilience Education*", Elsevier B.V., Salford Quays, 2014, hlm. 577-578.

Pengurangan Risiko Bencana II (WCDR II) memutuskan untuk menggunakan sasaran-sasaran strategis berikut ini:⁴

1. Integrasi secara lebih efektif pertimbangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan berkelanjutan di semua tingkat, dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta peredaman kerentanan terhadap bencana.
2. Pengembangan dan penguatan lembaga, mekanisme dan kapasitas di semua tingkat, terutama pada tingkat komunitas sehingga dapat secara sistematis menyumbangkan pada peningkatan ketahanan terhadap bahaya.
3. Secara sistematis memadukan pendekatan-pendekatan peredaman risiko ke dalam rancangan dan pelaksanaan program-program kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, tanggap darurat dan pemulihan dalam rangka rekonstruksi komunitas yang terkena dampak.

Sehingga muncul hasil yang diharapkan dari Konferensi Dunia tentang Pengurangan Risiko Bencana II yaitu bersama menyelesaikan dan mengejar hasil yang diharapkan untuk 10 tahun ke depan berupa pengurangan substansial kerugian bencana dalam kehidupan dan aset sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat dan negara. Realisasi ini akan memerlukan komitmen penuh dan keterlibatan semua aktor yang bersangkutan, termasuk pemerintah, organisasi regional dan internasional, masyarakat sipil termasuk relawan, sektor swasta dan komunitas keilmuan.⁵

Konferensi Dunia tentang Pengurangan Risiko Bencana II (WCDR II) dan HFA sebagai pengusung kerangka aksi kebencanaan memiliki banyak komponen untuk

⁴UNISDR, *“Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disaster”*, Geneva, 2005, hlm. 5.

⁵ Council of Europe, *“Open Partial Agreement On The Prevention of Protection Against and Organisation Of Relief In Major Natural and Technological Disaster”*, Strasbourg, 2005, hlm. 5.

pelaksanaan dan penanganan dalam pengurangan risiko bencana yang. Konferensi dunia tentang peredaman bencana memiliki 5 prioritas aksi dengan 22 indikator kunci yaitu:⁶

1. Memastikan bahwa peredaman risiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya.
 - 1.1. Kebijakan nasional dan kerangka hukum untuk pengurangan risiko bencana berpadu dengan desentralisasi tanggung jawab dan kapasitas di semua tingkatan.
 - 1.2. Berdedikasi dan sumberdaya yang memadai untuk mengimplementasikan rencana pengurangan resiko bencana dan aktivitas di semua tingkatan administratif.
 - 1.3. Partisipasi komunitas dan desentralisasi yang dijamin melalui pendelegasian wewenang dan sumber daya untuk tingkatan lokal.
 - 1.4. Berfungsinya platform multi-sektor nasional untuk pengurangan resiko bencana.
2. Mengidentifikasi, menilai dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
 - 2.1. Penilaian risiko lokal dan nasional yang didasarkan pada informasi data dan kerentanan bahaya yang tersedia serta termasuk penilaian risiko untuk sektor-sektor kunci.
 - 2.2. Sistem berada dalam posisi untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarkan data penting dari bahaya dan kerentanan yang terjadi.
 - 2.3. sistem peringatan dini yang ditempatkan pada semua titik yang memiliki bahaya besar, dengan jangkauan ke komunitas-komunitas.
 - 2.4. penilaian risiko nasional dan lokal mempertimbangkan resiko regional atau lintas batas, dengan proyeksi kerja sama regional resiko pengurangan bencana.

⁶Triutomo, Sugeng, Kurniawan, Lilik, Jefrizal, Revanche, Ardi, Multazam F.. *"A Decade of HFA: A Journey toward Indonesia Resilient to Disaster"*. Direktorat Pengurangan Resiko Bencana, Jakarta, 2015, hlm. 1.

3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatandan ketahanan di semua tingkat.

3.1. Informasi terkait kebencanaan tersedia dan dapat diakses oleh semua tingkatan dan stakeholder (melalui jaringan, pengembangan sistem berbagi informasi, dan lain-lain).

3.2. Kurikulum sekolah, materi pendidikan, dan pelatihan yang relevan termasuk pengurangan resiko bencana dan konsep pemulihan serta praktek.

3.3. Metode penelitian dan alat-alat untuk penilaian multi-resiko serta biaya analisa yang dikembangkan dan diperkuat.

3.4. strategi kewaspadaan masyarakat luas ada untuk merangsang budaya ketahanan bencana, dengan jangkauan masyarakat perkotaan dan pedesaan.

4. Meredam faktor-faktor resiko yang mendasari.

4.1. Pengurangan resiko bencana adalah bagian dari rencana dan kebijakan terkait lingkungan, termasuk penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya alam dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

4.2. Kebijakan dan rencana pengembangan sosial sedang dilakukan untuk mengurangi kerentanan pada populasi ketika terjadi resiko.

4.3. Kebijakan dan rencana ekonomi dan produktifitas sektoral telah diimplementasikan untuk mengurangi kerentanan pada aktifitas ekonomi.

4.4. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman masyarakat dengan menggabungkan elemen pengurangan resiko bencana termasuk dalam pelaksanaan kode pembangunan.

- 4.5. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi ke dalam pemulihan pasca bencana dan proses rehabilitasi.
- 4.6. Prosedur berada dalam posisi untuk menilai dampak resiko bencana dari proyek besar pembangunan, terutama infrastruktur.
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.
 - 5.1. Kebijakan yang kuat, kapasitas teknis dan kelembagaan serta mekanisme untuk manajemen risiko bencana, dengan perspektif pengurangan risiko bencana di dalamnya.
 - 5.2. Rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana kontinjensi berada di dalam semua tingkatan administratif, dan latihan serta pelatihan rutin diadakan untuk menguji dan mengembangkan penanggulangan bencana beserta program-programnya.
 - 5.3. Cadangan keuangan dan mekanisme kontinjensi berada di tempat untuk mendukung respon yang efektif dan pemulihan ketika diperlukan.
 - 5.4. Prosedur berada dalam posisi untuk bertukar informasi yang relevan selama peristiwa dan bencana, dan menangani tinjauan setelah peristiwa.

Pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap sasaran-sasaran strategis dan prioritas aksi seperti tercakup dalam HFA harus ditangani oleh berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan multisektoral, termasuk sektor pembangunan. Negara dan lembaga-lembaga regional dan internasional, termasuk PBB dan lembaga keuangan internasional, dihimbau untuk memasukkan pertimbangan peredaman risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan berkelanjutan mereka di segala tingkat. Masyarakat sipil, termasuk tenaga sukarela dan lembaga-lembaga berbasis komunitas,

komunitas ilmiah dan sektor swasta merupakan pemangku kepentingan yang penting dalam mendukung implementasi peredaman risiko bencana di semua tingkat.⁷

Tujuan dari HFA adalah membangun ketahanan bangsa-bangsa dan masyarakat melalui pengurangan substansial dalam kerugian bencana. Untuk mencapai tujuan ini, pengurangan risiko bencana (PRB) membutuhkan integrasi yang lebih besar ke negara-negara dan pemerintahan di tingkat global, mekanisme swasta, publik dan sektor non-profit, serta peningkatan substansial dalam investasi sesuai target yang telah disepakati secara internasional yang tercantum di tahun 2009 dalam platform global PRB, dan diperkuat langsung dengan keterlibatan masyarakat di mana orang-orang memiliki kerentanan hidup. Pemuda dan pendidikan anak-anak sebagai agen perubahan kunci harus terlibat di semua tingkat dan pada setiap langkah. Akuntabilitas yang kuat diperlukan untuk implementasi yang efektif atas HFA untuk mengukur kemajuan menuju objektifitas HFA.⁸

Meskipun setiap Negara memikul tanggung jawab utama bagi pembangunan ekonomi dan sosialnya sendiri, suatu lingkungan internasional yang mumpuni adalah suatu hal yang vital untuk mempercepat dan memberi sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan, kapasitas dan motivasi yang diperlukan untuk membangun bangsa dan masyarakat yang tahan terhadap bencana. Negara-negara dan lembaga-lembaga regional dan internasional harus mendorong koordinasi strategis yang lebih besar antara PBB, lembaga internasional lain, termasuk lembaga keuangan internasional, badan-badan regional, lembaga donor dan lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam peredaman risiko bencana, dengan berdasar pada Strategi Internasional untuk Peredaman Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction*) yang sudah diperkuat. Di tahun-tahun

⁷UNISDR, "Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disaster", Geneva, 2005, hlm. 14.

⁸Maalouf Sanaa, "Views from the Frontline Country Report for Lebanon.", Beirut, 2009, hlm. 4.

mendatang, pertimbangan harus diberikan untuk memastikan pelaksanaan dan penguatan instrumen legal internasional yang relevan yang terkait dengan peredaman risiko bencana.⁹

Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional juga harus mendukung kapasitas mekanisme dan lembaga regional dalam mengembangkan rencana-rencana, kebijakan, dan praktek bersama secara regional sebagaimana mestinya, untuk mendukung jejaring, advokasi, koordinasi, pertukaran informasi dan pengalaman, monitoring ilmiah terhadap bahaya dan kerentanan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan untuk menghadapi risiko bencana.

HFA sendiri memiliki aktor-aktor utama yaitu pemerintah negara, organisasi dan institusi regional, organisasi internasional (termasuk sistem PBB dan lembaga-lembaga keuangan internasional) serta peran penting masyarakat dan sektor swasta lokal dalam partisipasi pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.¹⁰

B. Hyogo Framework for Action (HFA) di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi hasil dari Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana kedua (*World Conference on Disaster Reduction - WCDR II*) bersama dengan 168 negara lainnya pada tanggal 17-21 Januari 2005 di Hyogo, Jepang. WCDR II tepat 21 hari sebelum bencana Tsunami Samudera Hindia pada tanggal 26 Desember 2004 sehingga memakan korban hingga 200.000 jiwa dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, India, Maladewa hingga ke Afrika. Sehingga konferensi tersebut menjadi bantuan krusial bagi Indonesia dalam menyusun dan melaksanakan kerangka aksi setelah bencana dan sejak tahun 2005 hingga 2015, kerangka aksi dan kerangka kerja dalam HFA menjadi landasan untuk pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia.

⁹ Council of Europe, *“Open Partial Agreement On The Prevention of Protection Against and Organisation Of Relief In Major Natural and Technological Disaster”*, Strasbourg, 2005, hlm. 15.

¹⁰Lei Zhou, Srinath Perera, Janaka Jayawickrama, Onaopepo Adeniyi, *“The Implication of Hyogo Framework for Action for Disaster Resilience Education”*, Elsevier B.V., Salford Quays, 2014, hlm. 578.

Sejak HFA pertama kali diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 sampai pada akhir kerangka kerja pada tahun 2015, Indonesia melewati 2 fase dalam 10 tahun pelaksanaan pengurangan risiko bencana dalam HFA. Fase awal (2005-2010) adalah periode untuk membangun komitmen bangsa dalam pengurangan risiko bencana. Fase ini dinilai penting, tidak hanya bagi kelangsungan pelaksanaan HFA tapi juga keberlanjutan pengurangan risiko bencana di Indonesia, karena komitmen bersama antara pemerintahan, organisasi atau instansi swasta serta masyarakat menjadi peranan penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Tahap kedua (2010-2015) berkonsentrasi pada peletakan dasar budaya dan sistem dalam manajemen risiko bencana. Tahapan ini menjadi langkah selanjutnya dimana pengurangan risiko bencana haruslah menjadi kewajiban bagi semua lapisan masyarakat. Serta pengadaan dan pembenahan sistem dalam hal kebencanaan menjadi penting karena di Indonesia sendiri bencana memiliki tempat dalam perundang undangan serta BNPB sebagai badan hukum yang legal serta menjadi pusat koordinasi bencana baik nasional dan daerah.

Sebagai landasan untuk pengurangan risiko bencana, HFA memiliki Strategi Internasional untuk Peredaman Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction*) dimana aktor-aktor pengurangan risiko bencana bekerja sama dengan lembaga-lembaga nasional, regional, internasional dan badan-badan PBB yang relevan dan didukung oleh sekretariat antar lembaga untuk *United Nation International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR), diminta untuk membantu pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi. HFA juga memfasilitasi koordinasi aksi yang efektif dan terpadu dalam sistem kelembagaan PBB dan antar entitas internasional dan regional lainnya sesuai dengan mandat mereka masing-masing yang mendukung pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi ini yaitu mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan dan memfasilitasi proses konsultasi

untuk mengembangkan pedoman dan perangkat kebijakan untuk tiap wilayah prioritas dengan melibatkan keahlian nasional, regional dan internasional yang relevan. Serta bantuan yang didapatkan oleh aktor-aktor nasional dan regional dari HFA dalam hal platform peredaman bencana untuk mendukung berbagai kebutuhan advokasi, kebijakan dan prioritas aksi.¹¹

Karena sifat intrinsik lintas-sektoral dalam permasalahan bencana, Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai sarana utama untuk mengurangi risiko bencana memiliki potensi secara signifikan untuk mempengaruhi transformasi budaya politik atau ekonomi dan memajukan pembangunan berkelanjutan. PRB dalam aksinya merangkul seluruh stakeholder dari semua lapisan masyarakat dan semua sektor dan diharuskan untuk bekerja sama dalam memerangi risiko umum yang kuat. Keberhasilan pelaksanaan PRB memerlukan dialog terbuka, dan biasanya disusun beberapa solusi untuk kerentanan yang mendasari-yang mungkin struktural fisik, lingkungan, sosial, ekonomi atau politik.

Bencana mengikis perkembangan keuntungan negara dan melampaui sistem nasional dan global saat ini yang dibangun untuk mengelolanya, PRB haruslah tersemat dalam sistem dan memiliki hubungan yang dinamis dengan sistem pemerintahan negara lain, bantuan kemanusiaan dan pembangunan internasional. Sistem ISDR harus terus menggunakan perannya untuk menaikkan tingkat kesadaran tentang masalah ini di semua tingkat, dan advokat untuk meningkatkan akuntabilitas dana publik untuk didedikasikan dan dialokasikan baik untuk tujuan kemanusiaan dan pembangunan, serta peninjauan lebih lanjut apakah hal tersebut stagnan atau mengurangi risiko.¹²

¹¹UNISDR, *“Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disaster”*, Geneva, 2005, hlm. 18.

¹²Melisa Bodenhamer, *“Mid-Term Review of The Hyogo Framework for Action. An Internal Analysis of Key Findings Submitted to The UN-ISDR by World Vision International.”*, 2011, hlm. 7.

Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara yang meratifikasi HFA terutama di wilayah Asia-Pasifik, Indonesia selalu dipantau perkembangannya oleh UNISDR terkait capaian HFA di Indonesia dalam berbagai aspek seperti kinerja aksi, proyeksi dan konklusi permasalahan bencana. Tidak hanya Indonesia, negara-negara yang meratifikasi HFA juga selalu dipantau pencapaiannya dikarenakan perbedaan masalah yang dihadapi negara-negara dalam kebencanaan. Sehingga HFA dapat menjangkau stakeholder dari pihak pemerintah maupun swasta untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Peningkatan kapasitas negara, swasta dan masyarakat juga menjadi salah satu acuan HFA di Indonesia dalam menyukseskan pengurangan risiko bencana.

UNISDR membentuk kantor regional untuk kawasan Asia-Pasifik untuk mempermudah terlaksananya program aksi HFA. Pembentukan kantor Asia-Pasifik ini berdasar kepada kejadian bencana pada bulan Desember 2004, tsunami yang tragis di Samudera Hindia sehingga meningkatkan kesadaran dari masyarakat di Asia dan Pacific tentang pentingnya mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional, dan mengingatkan mereka akan keharusan bekerja sama secara terkoordinasi dalam menghadapi ancaman bencana.¹³ Sehingga UNISDR Asia-Pasifik memiliki rencana regional berupa kampanye pengurangan risiko terhadap bencana dalam skala nasional maupun global dengan lebih sistematis dan didukung oleh berbagai pihak, kemudian mempromosikan pembentukan platform atau landasan hukum nasional untuk pengurangan risiko bencana dan melindungi masyarakat dalam negara-negara di regional Asia-Pasifik dalam hal kebencanaan. Melanjutkan dan memperkuat proyek yang dilaksanakan di bawah *United Nations Flash Appeal for the Indian Ocean Tsunami Early Warning System (IOTWS)*, termasuk peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan mitra

¹³ UNISDR, *"ISDR Informs: Pengurangan Bencana di Asia & Pasifik"*, Edisi Kedua, Bangkok, 2006, hlm. 8.

teknis yang relevan dan masyarakat pemberi donor. Dan yang terakhir adalah Mengembangkan sebuah sistem manajemen informasi yang efektif dengan database yang komprehensif, memelihara sebuah website regional, memproduksi sebuah publikasi dua tahunan yang berjudul “Disaster Reduction in Asia and the Pacific - UNISDR Informs”, menyebar luaskan wacana regional yang mempromosikan inisiatif dari mitra regional serta peristiwa-peristiwa lain yang terkait.¹⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan apresiasi besar dari UNISDR karena implementasi pengurangan risiko bencana terutama yang telah tercantum dalam kerangka aksi Hyogo. Sejak Indonesia ikut meratifikasi pada tahun 2005, banyak capaian dan peningkatan kinerja pemerintah pusat dan daerah perihal kebencanaan dan khususnya pengurangan risiko bencana.

Komitmen politik Indonesia dalam mengembangkan manajemen bencana semakin matang ketika baru 2 bulan saja Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi presiden Indonesia, bencana Tsunami melanda kawasan Aceh dan sekitarnya dan menjadi pukulan telak bagi Indonesia dan sangat disayangkan karena sebelum bencana tersebut datang Indonesia telah menyelesaikan penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009 dan program manajemen bencana tidak tercantum di dalamnya sehingga respon kebencanaan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta alokasi dana bencana justru menjadi masalah sendiri bagi Indonesia.¹⁵ Sehingga Indonesia mendapatkan pelajaran berharga tentang dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap manajemen, respon dan pengurangan risiko bencana.

Negara-negara yang meratifikasi HFA sebagai landasan pengurangan risiko bencana berkewajiban untuk mengirimkan laporan per dua tahun yang berisikan capaian

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Lilik Kurniawan, Sugeng Triutomo, Revanche Jefrizal, dan Multazam F. Ardi. *“A Decade of HFA: A Journey toward Indonesia Resilient to Disaster”*, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Jakarta, 2015. hlm. 7.

program dan sejauh mana prioritas aksi dalam HFA diimplementasikan oleh setiap negara. Indonesia sendiri telah menyelesaikan dan mengirimkan empat laporan perkembangan nasional ke UNISDR yaitu pada tahun 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013, dan 2013-2015. Empat laporan perkembangan tersebut oleh UNISDR akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan evaluasi untuk landasan pengurangan risiko bencana setelah HFA yaitu Sendai Framework.

Laporan perkembangan nasional yang dikirimkan oleh Indonesia menjadi cermin bagi pemerintah pada khususnya dan stakeholder serta masyarakat pada umumnya tentang bagaimana HFA di implementasikan dan dijalankan. Dalam laporan tersebut, analisis dan penilaian yang dilakukan mengacu kepada prestasi, tantangan dan kendala pada masing-masing indikator inti dalam setiap tindakan prioritas HFA. Dengan demikian dapat dilihat tingkat prestasi dan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga tindakan-tindakan positif yang telah dicapai. Berikut ini adalah gambaran dan tabel pencapaian lima prioritas aksi dalam HFA dari tahun 2007 hingga 2015 oleh Indonesia:¹⁶

1. Prioritas Aksi 1

Dalam peraturan dan kelembagaan nasional, pengurangan risiko bencana telah menjadi prioritas pembangunan dalam skala nasional. Hal tersebut dapat dilihat dengan dimasukkannya masalah pengurangan risiko bencana sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Dan pengurangan risiko bencana juga masih menjadi prioritas dalam penyusunan RPJMN untuk tahun 2015-2019.

Terkait dengan prioritas aksi ini, kemajuan yang signifikan terlihat pada aspek dedikasi dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk pengurangan risiko bencana

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13-31.

(indikator kunci 2), dan proses desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana (indikator kunci 3).

Perkembangan dalam penyediaan sumber daya dapat diperhatikan bahwa selama jangka waktu 2013 hingga 2015 sekitar 0,9% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dialokasikan untuk manajemen bencana. Sementara di tingkat lokal, sebanyak 0,38% anggaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan dan digunakan untuk desentralisasi usaha penanggulangan bencana. Pencapaian baik lainnya dapat dilihat dari partisipasi publik. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya LSM dan organisasi masyarakat yang aktif bekerjasama dengan masyarakat lokal dan memiliki inisiatif dalam pengurangan risiko di daerah rawan bencana.

Berikut ini adalah tabel nilai setiap indikator kunci dari prioritas aksi 1 dari hasil keempat laporan perkembangan nasional Indonesia:

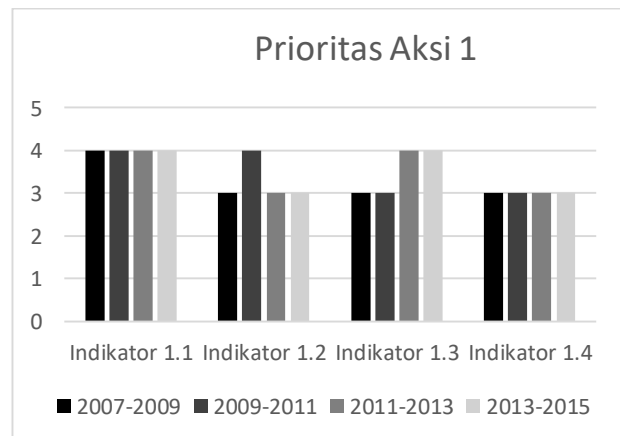


Diagram 2. Pencapaian prioritas aksi 1 HFA di Indonesia.
(A Decade of HFA: A Journey toward Indonesia Resilient to Disaster. 2015)

2. Prioritas Aksi 2

Indonesia memiliki pencapaian yang baik dalam hal identifikasi, penilaian, dan pemantauan risiko bencana. Selain itu, Indonesia juga telah mengembangkan sistem dasar peringatan dini bencana.

Pada tahun 2011 hingga 2013, Indonesia mengembangkan sistem peringatan dini yang berfokus kepada banyak bencana dan memperbanyak jenis bencana yang dapat ditangani oleh sistem peringatan dini. Namun hal ini menyebabkan pencapaian dalam layanan sistem peringatan dini ke area rawan bencana justru menurun.

Di sisi lain, Indonesia telah mampu melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap risiko bencana yang memenuhi standar, sehingga hasil dari penelitian dan penilaian tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan. Sejak tahun 2013 hingga 2015, penilaian risiko bencana telah dilakukan di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008, yang memberikan arahan atau rekomendasi kepada kabupaten atau kota supaya penilaian risiko bencana dapat diatur dan dilaksanakan di regionalnya dan juga melalui kemitraan dengan institusi lain.

Berikut ini adalah tabel nilai setiap indikator kunci dari prioritas aksi 2 dari hasil keempat laporan perkembangan nasional Indonesia:

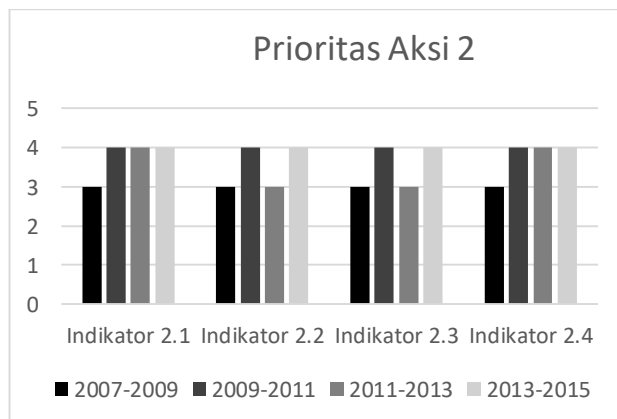


Diagram 3. Pencapaian prioritas aksi 2 HFA di Indonesia.
(A Decade of HFA: A Journey toward Indonesia Resilient to Disaster. 2015)

3. Prioritas Aksi 3

Dalam hal penggunaan ilmu pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya ketahanan bencana, Indonesia mampu menunjukkan beberapa pencapaian yang signifikan di masing-masing indikator kunci. Peningkatan yang signifikan terlihat dari segi kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan termasuk di dalamnya berisi konsep-konsep pengurangan dan pemulihan risiko bencana yang disertai oleh praktek (indikator kunci 2). Pengembangan dan memperkuat metode penelitian dan alat penilaian risiko bencana serta analisis untung dan rugi (indikator kunci 3), dan implementasi atau penerapan strategi kesadaran yang ada untuk menstimulasi budaya ketahanan bencana dengan jangkauan masyarakat desa dan kota (indikator kunci 4).

Prestasi Indonesia ditunjukkan dengan adanya integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam pendidikan dan penelitian ilmiah. Hal ini disahkan oleh surat edaran dari Menteri Pendidikan Nasional yang mendorong integrasi pengurangan risiko bencana ke sekolah. Materi pendidikannya dapat ditransformasikan subjeknya menjadi konten lokal, program sekolah atau ekstrakurikuler. Selain itu, banyak universitas yang mengembangkan pusat penelitian dan studi bencana. Dan bersama dengan BNPB, beberapa universitas telah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis kerja lapangan atau magang.

Berikut ini adalah tabel nilai setiap indikator kunci dari prioritas aksi 3 dari hasil keempat laporan perkembangan nasional Indonesia:

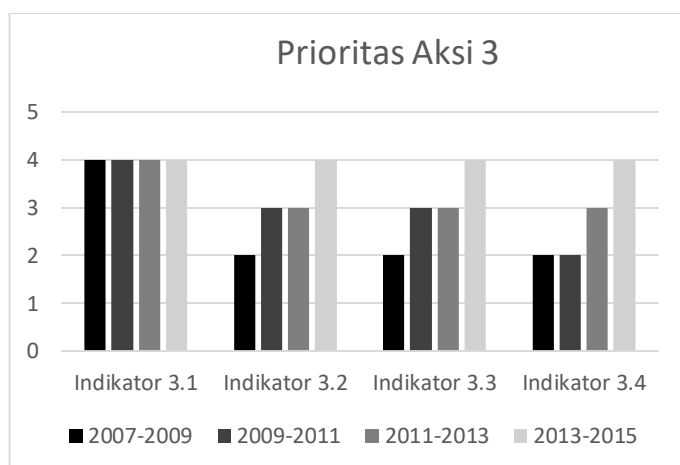


Diagram 4. Pencapaian prioritas aksi 3 HFA di Indonesia.
(A Decade of HFA: A Journey toward Indonesia Resilient to Disaster. 2015)

4. Prioritas Aksi 4

Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengurangi faktor risiko yang mendasar, terutama dalam aspek kerentanan sosial, fisik dan lingkungan. Beberapa upaya yang signifikan telah membuahkan hasil yang baik meskipun tidak komprehensif, dan demikian masih perlu adanya peningkatan. Intervensi terhadap faktor-faktor risiko yang menimbulkan kerentanan di bidang ekonomi masih kurang baik. Dengan kurangnya pencapaian ekonomi dan produktifitas kebijakan sektoral dan rencana dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan dalam kegiatan ekonomi (indikator kunci 3), Indonesia harus terus memperkuat semua landasan pengurangan risiko dengan seimbang, komprehensif dan terus menerus.

Selain kurangnya Intervensi dalam hal kerentanan di bidang ekonomi, kinerja secara umum untuk indikator dalam prioritas aksi keempat masih baik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun kurang komprehensif, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang ada, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Berikut ini adalah tabel nilai setiap indikator kunci dari prioritas aksi 4 dari hasil keempat laporan perkembangan nasional Indonesia:

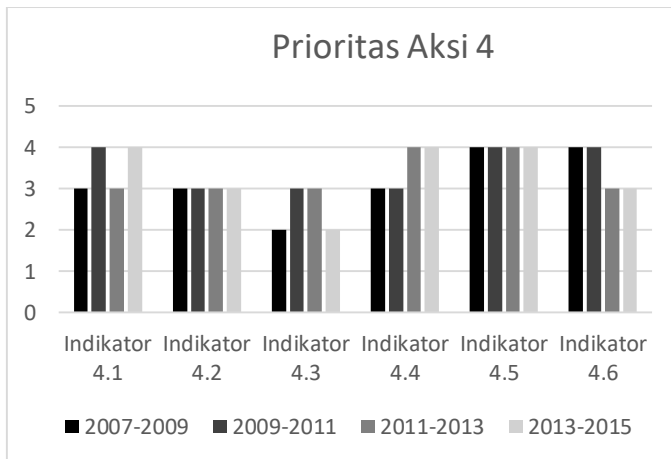


Diagram 5. Pencapaian prioritas aksi 4 HFA di Indonesia.

(A Decade of HFA: A Journey toward Indonesia Resilient to Disaster. 2015)

5. Prioritas Aksi 5

Indonesia memiliki kapasitas kesiapan dasar dalam merumuskan rencana operasi darurat. Dalam periode 2005 sampai 2015, Indonesia dinilai berhasil meningkatkan efektivitas sebagian besar indikator dalam prioritas aksi ini.

Kurangnya pemahaman terhadap cadangan keuangan dan mekanisme kemungkinan disediakan untuk mendukung respon yang efektif dan pemulihan ketika dibutuhkan (indikator kunci 3) pada awal penilaian, mengakibatkan indikator kunci ini tidak dapat dikembangkan secara optimal.

Namun di sisi lain, rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana kontinjensi berada dalam tingkatan administrasi, dan pelatihan rutin dan repetisi diadakan untuk menguji dan mengembangkan program respon terhadap bencana (indikator kunci 2) yang awalnya dinilai sebagai indikator terendah secara signifikan meningkat kapasitasnya di Indonesia.

Berikut ini adalah tabel nilai setiap indikator kunci dari prioritas aksi 5 dari hasil keempat laporan perkembangan nasional Indonesia:

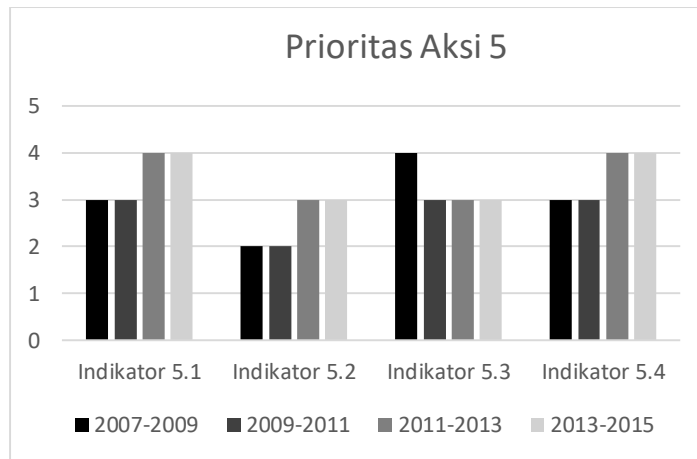


Diagram 5. Pencapaian prioritas aksi 5 HFA di Indonesia.
 (A Decade of HFA: A Journey toward Indonesia Resilient to Disaster. 2015)